

## **ABSTRAK**

Skripsi yang ditulis oleh penulis berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (Pembatalan Dan Mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan)”. Seorang pemegang Sertifikat Hak Milik yang telah terbit dahulu mengalami sengketa tumpang tindih dengan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sengketa tumpang tindih terjadi karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna Bangunan apabila haknya dibatalkan oleh kantor Pertanahan Kota Semarang, mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/TUN/2018 JO. 128/PK/TUN/2019 (pembatalan dan mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan). Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum dan meneliti bagaimana bekerjanya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis didapatkan hasil bahwa upaya hukum yang dilakukan pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan apabila dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu dengan mempertahankan hak keperdataannya melalui upaya peradilan perdata, analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/TUN/2018 Jo. 128/PK/TUN/2019 (Pembatalan Dan Mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan) bahwa bahwa putusan tersebut belum tepat karena Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Asas-Asas Good and Clean Governance.

**Kata Kunci : Pembatalan, Pencabutan, Sertifikat, Hak Guna Bangunan.**



## **ABSTRACT**

*This research was written by myself as the researcher entitled "juridical analysis of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 616 K/TUN/2018 JO. 128/PK/TUN/2019 (Cancellation and revocation of building use rights certificates). A holder of a Right of Ownership Certificate that has previously been issued experiences an overlapping dispute with the holder of a Building Use Right Certificate. The overlapping dispute occurred because of an administrative error committed by the Semarang City Land Office. The purpose of the author in this study is to find out the legal remedies made by the holders of Building Use Rights if their rights are canceled by the Semarang City Land Office, to know the juridical analysis of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 616 K / TUN / 2018 JO. 128 / PK / TUN / 2019 (cancellation and revocation of Building Use Rights certificate). The approach method used by the author is juridical empirical, namely the legal research method used to see the law and examine how it works by applying laws and regulations in the community. Based on the research conducted by the author, the results show that the legal action taken by the holder of the Building Use Right if it is canceled by the Semarang City Land Office is by defending their civil rights through civil court efforts, juridical analysis of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 616 K / TUN / 2018 Jo . 128 / PK / TUN / 2019 (Cancellation and Revocation of Building Use Rights Certificate) that the decision was not correct because the Semarang City Land Office did not pay attention to the General Principles of Good Governance (AAUPB) and the Principles of Good and Clean Governance.*

**Keywords:** Cancellation, Revocation, Certificate, Building Rights.

